

**POLITICAL TRUST MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK DAN NON ILMU
POLITIK TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF**

Jorawan Setiaji Rasyid¹, Nuke Martiarini²
nuke.martiarini@mail.unnes.ac.id

^{1,2)} Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Mahasiswa memiliki berbagai bidang studi yang ditekuni, salah satunya adalah ilmu politik. Pemahaman mengenai politik antara mahasiswa ilmu politik dengan mahasiswa yang tidak menekuni ilmu politik dianggap akan berbeda oleh peneliti. Informasi dalam lingkungan pendidikan yang dijalani dan diterima mahasiswa dianggap mempengaruhi *trust* pada sistem politik yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan *political trust* antara mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa non ilmu politik terhadap anggota legislatif. Populasi pada penelitian ini adalah 100 mahasiswa program ilmu politik dan 100 mahasiswa non ilmu politik di Universitas Negeri Semarang.

Hasilnya adalah ada perbedaan *political trust* yang signifikan pada kelompok subjek yang merupakan mahasiswa ilmu politik dan kelompok mahasiswa non ilmu politik, dengan skor $t = 5,609$ (t hitung $>$ t tabel yaitu 1,972) dengan $p = 0,000$ ($p < 0,05$).

Kata Kunci: *political trust*, legislatif, mahasiswa

ABSTRACT

College student have different view about political condition that happens their areas. In college education they have many branch of knowledge, one them is political science. Student who take political science study program have much political knowledge than the others. The education and enviroment that they have will affecting the political trust.

This research aims to determine whether differences in trust to parliament members between political science college student and the other, who doesnt take political science degree. Totals population in this rearch is 200 subjects. This research take 100 subjects of college student in political science degree, and 100 subjects of college student not in political science degree in Universitas Negeri Semarang.

After statistical analysis, the results of this research showed of a difference of political trust between two groups of college students. Political science student have higher value of political trust than college student who not in political science degree. However, two groups of college student still in the same level of trust.

Keywords: *political trust, parliament, student*

PENDAHULUAN

Rasa percaya menjadi salah satu komponen penting dalam suatu interaksi. Tanpa rasa percaya, individu tidak dapat membina relasi yang baik. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah relasi antar individu, baik dalam ranah formal maupun non formal. Dalam ranah formal, misalnya hubungan secara politis, rasa percaya rakyat terhadap pelaku politik (pemimpin) mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi suatu bangsa, tanpa terkecuali bangsa Indonesia.

Rasa percaya dalam ranah politik yang kemudian dikenal dengan istilah *political trust* dapat dimaknai sebagai rasa percaya rakyat terhadap pemimpinnya. Rasa percaya rakyat dapat berupa kepedulian yang ditunjukkan dengan kemauan rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Ketika rakyat masih mau “bersuara” maka hal tersebut merupakan indikator bahwa rakyat percaya terhadap pemimpinnya. Salah satu wadah menyuarakan aspirasi rakyat di Indonesia adalah melalui Pemilihan Umum (pemilu). Pemilihan umum dilakukan untuk menentukan pemimpin. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk memilih pemimpin legislatif dari tingkat daerah sampai tingkat pusat (nasional).

Beberapa periode pemilu terakhir ini, banyak Warga Negara Indonesia yang memilih untuk “tidak memilih” atau tidak terlibat dalam proses pemilu. Berbagai alasan melatarbelakangi sikap warga untuk tidak terlibat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Peningkatan jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya kemudian dapat dikaitkan dengan menurunnya kepercayaan politik warga terhadap para pemimpin legislatif. Persentase rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif semakin meningkat dari tahun ke tahun. Survey yang dilakukan oleh Puspooyo (2009) menunjukkan bahwa partisipasi politik rakyat Indonesia dalam pemilu legislatif sejak tahun 1955 sampai tahun 2009 trennya semakin meningkat. Tahun 1971, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar

6,67%, tahun 1977 sebesar 8,40%, tahun 1982 sebesar 9,61%, sedangkan pada tahun 1987 turun menjadi 8,39%. Tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan, tahun 1992 sebesar 9,05%, tahun 1997 sebesar 10,07%, tahun 1999 sebesar 10,40%, tahun 2004 sebesar 23,34%, dan yang terakhir tahun 2009 sebesar 39,22%.

Ketidakpuasan terhadap kinerja anggota legislatif, dimana janji-janji yang diberikan saat kampanye tidak ditepati, keputusan yang diambil juga tidak mewakili harapan rakyat, selanjutnya dianggap sebagai sebuah kegagalan yang menyebabkan warga menjadi tidak lagi percaya. Hal ini diperburuk dengan semakin banyaknya berita terkait korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan semakin banyak politikus (anggota legislatif) yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Dalam kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional misalnya, KPK menetapkan beberapa anggota DPRD Riau dari partai X sebagai tersangka, bahkan KPK juga menyelidiki keterlibatan Gubernur Riau yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut. Kasus lain yang menyedot perhatian publik adalah korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu anggota Komisi Agama DPR dari partai X. Maraknya penangkapan anggota atau kader partai X membuat masyarakat menjadi enggan untuk memilih pemimpin yang diusung oleh partai X. Hal ini ditunjukkan saat pemilu kepala daerah di DKI Jakarta pada tahun 2013 lalu, pasangan yang diusung partai X hanya mendapat dukungan suara kurang dari 5% (www.nasional.tempo.co.id, diakses pada 16/09/2015). Selanjutnya adalah berita mengenai seorang sekretaris jenderal partai politik yang juga menjabat sebagai anggota komisi III DPR RI tersandung kasus korupsi. Sekretaris jenderal partai nasionalis demokratis ini tersandung kasus dugaan suap dalam bantuan sosial di Sumatera utara (nasional.sindonews.com, diakses pada 10/06/2016).

Penetapan status tersangka terhadap anggota komisi III DPR RI ini semakin menurunkan kepercayaan politik terhadap lembaga politik di negeri ini.

Selain masalah korupsi, ada pula anggota legislatif yang terjerat kasus narkoba. Dalam razia narkoba yang dilakukan pada Rabu, 24 Februari 2016, Kapolri menyatakan ada sembilan anggota DPR yang terjaring razia narkoba (www.beritasatu.com, diakses pada 10/06/2016). Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan yang seharusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat, namun beberapa diantaranya malah memberikan contoh yang buruk.

Secara teoritis, *trust* atau rasa percaya adalah sebagai kesediaan untuk menerima atau menjadi terbuka terhadap orang lain, didasarkan pada keyakinan bahwa orang lain itu dapat dipercaya, terbuka, kompeten, dan peduli (Searle dan Skinner, 2011). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Colcuitt, Scott, dan LePine (2007) menunjukkan bahwa individu dapat dipercaya berdasarkan tiga hal yaitu kemampuan/*ability*, *benevolence*, dan *integrity*. Aspek yang diutarakan Colcuitt, Scott, dan LePine serupa dengan pendapat Mayer, Davis, dan Scoorman (1995) yang menyatakan bahwa aspek *trust* adalah *ability*, *benevolence*, dan *integrity*. Secara lebih spesifik, *ability*/kemampuan adalah keterampilan, kompetensi, dan karakteristik individu yang memungkinkan pihak untuk memiliki pengaruh dalam beberapa bidang tertentu. Adapun *benevolence*/kebajikan adalah sejauhmana individu diyakini ingin melakukan hal baik untuk *trustor* (orang yang mempercayai), selain dari motif keuntungan egosentris. Berikutnya, *integrity*/integritas adalah sifat individu yang jujur, dapat dipercaya dan tidak pernah ingkar janji.

Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik menurut Wong (dalam Wahyudi, 2013) ada dua yaitu, faktor institusi yang berkaitan dengan ekonomi dan performa dari pemerintah dan lembaga politik, serta faktor budaya yang meliputi sosiologis dan psikologis. Lebih lanjut,

Christensen dan Laegreid (dalam Wahyudi, 2013), budaya politik dan sosiodemografi seperti umur, pendidikan dan pekerjaan berperan dalam membentuk kepercayaan politik.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *political trust* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan pendidikan dalam hal ini bukan hanya soal jenjang atau tingkat pendidikan, tetapi juga bidang pendidikan yang ditekuni. Pengetahuan antar murid Sekolah Dasar dengan pengetahuan murid Sekolah Menengah pastilah berbeda. Begitu pula pengetahuan antara mahasiswa dengan masyarakat awam. Bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa juga cukup beragam. Terkait dengan penelitian ini, peneliti membagi cakupan bidang ilmu menjadi dua kelompok besar, yaitu bidang politik (jurusan ilmu politik) dan bidang non politik (selain jurusan ilmu politik). Adapun asumsi yang mendasarinya adalah mahasiswa yang mendalami ilmu yang berhubungan dengan sistem politik dapat lebih memahami konsep politik yang ideal sehingga diprediksi memiliki *mindset* yang berbeda dengan mahasiswa yang tidak secara formal mendalami bidang politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan *political trust* pada mahasiswa jurusan ilmu politik dan non ilmu politik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif komparasi. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala *political trust* yang disusun berdasarkan tiga aspek, yaitu *ability*, *benevolence*, dan *integrity*. Pada awalnya skala *political trust* terdiri dari 24 aitem pernyataan, tetapi setelah dilakukan uji coba dan diuji validitasnya terdapat dua aitem yang tidak valid, sehingga pada akhirnya aitem yang tersisa sejumlah 22. Adapun koefisien reliabilitasnya tergolong tinggi, yaitu sebesar 0,911. Subjek yang

terlibat dalam penelitian ini sejumlah 200 orang, dengan rincian 100 orang mahasiswa jurusan ilmu politik dan 100 orang mahasiswa jurusan non ilmu politik. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah gambaran subjek berdasarkan data identitas yang diperoleh:

Tabel 1.
Gambaran Subjek Penelitian

Program Studi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mahasiswa Ilmu Politik	48	52	100
Mahasiswa Non-Ilmu Politik	36	64	100
Total	84	116	200

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran *political trust* terhadap anggota legislatif pada kelompok mahasiswa program studi ilmu politik sebagian besar berada pada kategori sedang. Sedangkan gambaran mengenai *political trust* terhadap anggota legislatif pada kelompok mahasiswa program studi non-ilmu politik sebagian besar juga berada pada kategori sedang. Berikut adalah tabel kategorisasinya :

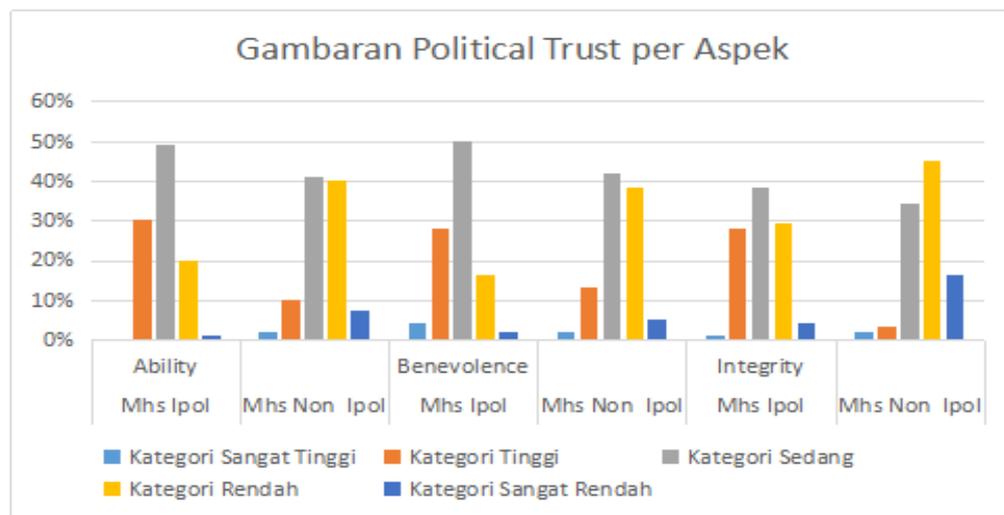
Tabel 2.
Kategori *Political Trust* terhadap Anggota Legislatif pada Subjek

Kategori	Mahasiswa Ilmu Politik		Mahasiswa Non-Ilmu Politik	
	Frekuensi (orang)	Persentase (%)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	0	0	2	2%
Tinggi	29	29%	5	5%
Sedang	49	49%	47	47%
Rendah	22	22%	40	40%
Sangat Rendah	0	0	6	6%
Total	100	100%	100	100%

Secara lebih detil, gambaran *political trust* pada dua kelompok subjek dapat dilihat melalui aspek-aspek yang menyusun *political trust*. Berikut adalah tabel dan diagram perbandingan skor antar dua kelompok subjek pada tiap aspek:

Tabel 3.
Kategori *Political Trust* terhadap Anggota Legislatif per Aspek

Aspek	Subjek	Kategori				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Ability	Mhs Ilmu Politik	0%	30%	49%	20%	1%
	Mhs Non Ilmu Politik	2%	10%	41%	40%	7%
Benevolence	Mhs Ilmu Politik	4%	28%	50%	16%	2%
	Mhs Non Ilmu Politik	2%	13%	42%	38%	5%
Integrity	Mhs Ilmu Politik	1%	28%	38%	29%	4%
	Mhs Non Ilmu Politik	2%	3%	34%	45%	16%



Gambar 1. Gambaran *Political Trust* per Aspek

Berdasarkan diagram tersebut diatas tampak bahwa kedua kelompok subjek, baik mahasiswa program studi ilmu politik maupun kelompok mahasiswa non-program studi ilmu politik pada aspek *ability* mayoritas berada pada taraf sedang. Akan tetapi kelompok mahasiswa ilmu politik menunjukkan

persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok mahasiswa non ilmu politik (meskipun kategorinya masih sama). Demikian pula dengan aspek *benevolence*. Adapun untuk aspek *integrity* kedua kelompok mayoritas juga berada pada taraf sedang. Akan tetapi yang menarik adalah pada aspek *integrity* ini kelompok mahasiswa program studi ilmu politik justru menunjukkan skor yang lebih rendah (38%) daripada kelompok subjek mahasiswa non-ilmu politik (45%).

Selanjutnya dilakukan uji asumsi guna mengetahui normalitas dan homogenitas data penelitian. Dan hasilnya menunjukkan bahwa data normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan teknik *Independent Sample T-test* dengan bantuan *software* pengolah data. Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis :

Tabel 4.
Hasil Uji Hipotesis

		<i>Political Trust</i>	
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's	F	,052	
Test for	Sig. Equality of Variances	,819	
t-test for	t	5,609	5,609
Equality	df	198	194,097
of Means	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	Mean Difference	6,920	6,920
	Std. Error Difference	1,234	1,234
	95%Lower Confidence Upper	4,487	4,487
	Interval of the Difference	9,353	9,353

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui t hitung 5,609. Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel (1,972) dengan taraf kepercayaan 95% dimana $p = 0,000$ ($p < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan *political trust* yang signifikan pada kedua kelompok subjek (mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa non-ilmu politik).

Subjek dalam penelitian ini berada pada jenjang pendidikan yang sama, yaitu mahasiswa. Mereka berada pada jenjang usia 17 hingga 24 tahun, yang berarti mereka berada pada tahap perkembangan remaja akhir hingga dewasa awal. Pada masa dewasa awal ini tugas perkembangan mereka adalah mulai untuk beradaptasi dengan norma-norma kehidupan, seperti perilaku politik yang ada. Mereka dapat berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara mengikuti organisasi ataupun mulai selektif dalam menggunakan hak pilihnya. Hak pilih dalam menentukan kepala negara, kepala daerah dan anggota legislatif. Selain itu organisasi juga menjadi wadah bagi mereka yang ingin belajar mengenai sistem perpolitikan yang ada.

Keikutsertaan subjek terhadap organisasi dapat dilihat sebagai bentuk kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik yang ada. Dimana mereka tidak puas terhadap hasil atau keputusan politik dilingkungannya. Mereka ingin berpartisipasi terhadap pembentukan kebijakan atau keputusan. Keikutsertaan dalam organisasi dapat diartikan pula sebagai proses untuk mencari tahu bagaimana suatu organisasi berjalan. Rasa ingin tahu individu terhadap sistem politik yang ada atau kurangnya pengetahuan individu terhadap suatu organisasi menjadi salah satu hal yang mendorong individu untuk masuk kedalam suatu organisasi. Hal ini sesuai pada hasil penelitian Matulesy (2013) mengenai kepercayaan politik dan partisipasi dalam gerakan mahasiswa, yang menyatakan bahwa kepercayaan politik memiliki hubungan negatif dengan gerakan mahasiswa. Hal tersebut sesuai jika melihat jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi cenderung rendah.

Pendidikan yang memberikan perbedaan terhadap tingkat *political trust* pada anggota legislatif tidak hanya pada jenjang pendidikan, namun pada jenis pendidikan yang dijalani individu. Dalam pendidikan ini menggunakan 2 kelompok subjek yang memiliki jenjang pendidikan yang sama (mahasiswa S1), namun berbeda jurusan yang ditempuh oleh kedua kelompok. Mahasiswa yang menempuh program studi ilmu politik memiliki *trust* pada anggota legislatif lebih tinggi dari pada mahasiswa non-ilmu politik. Hal itu sesuai dengan pendapat Hakhverdian dan Mayne (2012) dalam

penelitiannya mengenai *institutional trust, education, and corruption: a micro-macro interactive approach* yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai sistem politik memiliki pengaruh lebih terhadap *trust* dari pada pengetahuan umum. Pengetahuan mengenai sistem politik tentunya lebih banyak diterima oleh mahasiswa program studi ilmu politik dibanding mahasiswa non-ilmu politik.

Apabila dicermati setiap aspeknya, pada aspek *ability* kedua kelompok subjek berada didalam taraf yang sama, dengan nilai mean pada mahasiswa ilmu politik dan pada mahasiswa non-ilmu politik sama pada kategori sedang. Aspek *ability* pada kedua kelompok memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan aspek *benevolence* dan *integrity*. Hal ini berarti kemampuan anggota legislatif mengenai ketrampilan, kompetensi, dan karakteristik untuk mempengaruhi bidang politik menjadi hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap *trust* pada anggota legislatif. Selanjutnya pada aspek *benevolence/kebijakan*, pada aspek ini kedua kelompok subjek berada didalam taraf yang sama, skor pada mahasiswa ilmu politik dan pada mahasiswa non-ilmu politik berada kategori sedang. Keyakinan subjek terhadap anggota legislatif untuk melakukan hal baik terhadap subjek tanpa mementingkan kepentingan anggota legislatif berada dalam taraf sedang. Terakhir adalah aspek *integrity/integritas*, kedua kelompok subjek berada didalam taraf yang beda, dengan skor pada mahasiswa ilmu politik berada pada taraf sedang dan pada mahasiswa non-ilmu politik berada pada taraf sedang. Namun pada aspek ini kedua kelompok subjek penelitian memiliki skor tertinggi. Hal ini berarti anggota legislatif yang mampu menunjukkan sifat kejujuran, dapat dipercaya, dan tidak ingkar janji lebih mendapatkan *trust* pada anggota legislatif dari subjek penelitian ini.

Meskipun berada dalam taraf yang mayoritas sama dalam ketiga aspek tersebut, tetapi nilai mean populasi mahasiswa ilmu politik selalu lebih tinggi dibandingkan nilai mean populasi mahasiswa non-ilmu politik. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan mengenai sistem politik sedikit banyak mempengaruhi *political trust* pada anggota legislatif. Pendidikan atau pengetahuan yang diterima individu

terutama mengenai konsep dan sistem politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat *political trust*, baik secara kelompok maupun individu.

Sesuai dengan penelitian Mayer, dkk. (1995) mengenai *an integrative model of organizational trust* yang menyatakan bahwa aspek *ability*, *benevolence* dan *integrity* memiliki hubungan positif. Jika *trust* tinggi maka dapat dipastikan ketiga aspek tersebut berada pada taraf tinggi pula. *Trust* pada anggota legislatif oleh mahasiswa yang menjadi subjek penelitian berada pada kategori sedang, maka ketiga aspek tersebut berada pada taraf sedang pula. Subjek hanya akan mempercayai tindakan anggota legislatif yang dapat mereka pantau atau lihat. Seperti tindakan penenggelaman kapal nelayan asing yang mencuri ikan diwilayah kita yang sering diberitakan media. Subjek melihat hal tersebut sebagai hasil dari sistem politik yang ada dan mengapresiasinya secara positif. Lain halnya dengan berita negatif seperti korupsi, hal tersebut akan menurunkan penilaian subjek terhadap ketiga aspek. Jika penilaian terhadap ketiga aspek tersebut turun, maka kepercayaan politik akan turun juga,

Kembali ke pengertian *trust* secara umum dimana *trust* adalah kesediaan untuk menerima ataupun mengambil resiko dalam suatu hubungan dengan menjadi terbuka terhadap orang lain, maka kategori *political trust* pada anggota legislatif yang sedang dapat diartikan sebagai subjek masih enggan dan tidak mau terbuka secara penuh anggota legislatif terkait dengan ruang-lingkup kerjanya sebagai wakil dari masyarakat didalam sistem pemerintahan yang demokratis. Penilaian terhadap ketiga aspek yang terdapat pada lembaga legislatif pun cenderung sedang. Kategori sedang dapat diartikan pula sebagai ketidaktahuan subjek mengenai bagaimana seharusnya sistem politik berjalan. Ketidaktahuan yang berakibat pada keraguan atau keengganan untuk percaya terhadap sistem politik yang ada.

Untuk mengatasi ketidaktahuan tersebut, maka diperlukan pengetahuan. Pengetahuan mengenai sistem politik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa *political trust* pada anggota legislatif oleh mahasiswa

yang mempelajari ataupun mendalami ilmu politik lebih tinggi dari pada yang tidak mendalami. Pentingnya pengetahuan untuk membentuk rasa percaya. Pengetahuan yang baik mengenai sistem politik beserta fungsinya akan menghasilkan kepercayaan politik yang baik pula. Generasi yang sadar akan fungsi dan tanggung jawab politiknya, akan menjaga serta memajukan budaya politik dalam suatu bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan mengenai *trust* pada anggota legislatif di dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

- 1) Adanya perbedaan yang signifikan mengenai *political trust* pada anggota legislatif antara mahasiswa program studi ilmu politik dengan mahasiswa non-ilmu politik. Mahasiswa program studi ilmu politik memiliki skor *political trust* pada anggota legislatif lebih tinggi dari pada mahasiswa non-ilmu politik. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai sistem politik yang ada memberi pengaruh positif terhadap *political trust* pada anggota legislatif.
- 2) Mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa non-ilmu politik memiliki tingkat *political trust* pada anggota legislatif yang sama, yaitu berada pada kategori sedang.
- 3) Aspek *integrity* pada anggota legislatif menjadi aspek yang menyumbang pengaruh lebih terhadap *political trust* pada anggota legislatif, baik pada mahasiswa ilmu politik maupun mahasiswa non-ilmu politik dibanding aspek *ability* dan *benevolence*.

DAFTAR PUSTAKA

Beritasatu.com. (2016, Februari 24). <http://www.beritasatu.com/nasional/351249-penggerebekan-kostrad-kapolri-sebut-9-anggota-dpr-ditangkap-karena-narkoba.html>. Dipetik Juni 10, 2016, dari <http://www.beritasatu.com>: <http://www.beritasatu.com/nasional/351249-penggerebekan-kostrad-kapolri-sebut-9-anggota-dpr-ditangkap-karena-narkoba.html>

Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, Trustworthiness and Trust Propensity: A Meta Analytic Test of Their Unique Relationship With Risk Taking and job Performance. *Journal of Applied Psychology*, 92, 909-927.

Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional Trust, Education, And Corruption: A Micro-Macro Interactive Approach. *Journal of Politics* 73:3.

Matulesy, A. (2013). Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self-esteem Dengan Partisipasi Dalam Gerakan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi* 2013, 04, 84-106.

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Scoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of management Review*, 20, 709-734.

Nasional, T. (t.thn.). *Efek kasus Korupsi, Pamor Golkar Meredup*. Dipetik September 16, 2015, dari <http://www.nasional.tempo.co>

Puspoyo, W. (2009). Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1995-2009. *Jurnal Perempuan*.

Searle, R. H., & Skinner, D. (2011). *Trust and Human Resource Management*. USA: Edward Elgar Publishing Inc.

Sindonews.com. (2015, Oktober 15). <http://nasional.sindonews.com/read/1053688/16/lagi-lagi-anggota-dpr-terjerat-korupsi-1444991055>. Dipetik Juni 10, 2016, dari nasional.sindonews.com: <http://nasional.sindonews.com/read/1053688/16/lagi-lagi-anggota-dpr-terjerat-korupsi-1444991055>

Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9.